

BAB II

DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA DENGAN POLITIK, DAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

A. Dinamika Nahdlatul Ulama dan Politik

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi dimana pada masa terbentuknya, Islam tengah mengalami sebuah gelombang perubahan dengan adanya peralihan abad ke-19. Maraknya gerakan nasionalisme di negeri-negeri Muslim seperti Mesir, Turki, dan India, serta kembali munculnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia yang bergulat pada persoalan reformisme faham tauhid dan konservatiseme bidang hukum.⁴⁰ Adanya penjajahan oleh Belanda di tanah air, serta perang dunia di awal abad ke-19, menjadikan para pemimpin Islam di Indonesia harus berpikir dan bergerak cepat dalam menghadapi perkembangan yang tengah terjadi. Pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Mekkah, yakni Kyai Abdul Wahab dan Mas Mansur kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Watan yang memiliki arti kebangkitan Tanah Air pada tahun 1914. Nahdlatul Wathan menjadi sebuah organisasi pendidikan dan dakwah yang menyelenggarakan pendidikan formal berupa madrasah (sekolah), kursus-kursus perjuangan, organisasi, dan administrasi.⁴¹ Nahdlatul Wathan sendiri menjadi cikal dari lahirnya Nahdlatul Ulama.

Peristiwa Hijaz yang terjadi pada tanggal 31 Januari 1926 menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari lahirnya Nahdlatul Ulama. Para kyai yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki pondok pesantren menghadapi kegusaran pasca di wilayah Arab Saudi di kepemimpinan Raja Saud. Raja Saud menghendaki hanya menghendaki madzhab Wahabi sebagai satu-satunya madzhab yang diakui. Sentimen anti madzhab di Arab Saudi kemudian menjadikan diadakannya pertemuan Islam yang dilaksanakan di Mekkah. Bagi Ulama atau kyai pesantren, sentimen anti

⁴⁰ M Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 35

⁴¹ *Ibid*, hal. 36

madzhab memiliki dampak yang buruk, seperti memberanguskan tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam. Hal ini tentu berdampak pada kemajuan peradaban Islam itu sendiri.⁴²

Para ulama pesantren yang berangkat sebagai komite Hijaz memiliki berbagai macam tujuan, antara lain adalah tuntutan dalam pelestarian tradisi keagamaan berdasar pada ajaran madzhab *ahlussunnah wal jamaah*, perbaikan tata laksana ibadah haji, tradisi tarekat sufi dan wirid, pembacaan shalawat Nabi dan pengajaran akan kitab-kitab madzhab agar dapat tetap diizinkan untuk dijalankan.⁴³ Dari semua harapan yang diajukan oleh Nahdlatul Ulama, tidak semua mendapat jawaban dari pemimpin Hijaz, kecuali satu yakni terkait kebebasan dalam menjalankan praktek keagamaan menurut ajaran madzhab empat.

Nahdlatul Ulama kemudian berdiri pada tahun 1926 yang dipelopori oleh K.H Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Bisri dari Jombang, K.H. Riduwan dari Semarang, K.H. Nawawi dari Pasuruan, K.H.R. Asnawi dan K.H.R Hambali dari Kudus, Kyai Nakhrawi dari Malang, K.H. Doromuntaha dari Bangkalan, dan kyai-kyai dari pondok pesantren lainnya.⁴⁴ Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy'ari kemudian bertindak sebagai ketua Nahdlatul Ulama pertama di Indonesia. Pengaruh dari K.H. Hasyim Asy'ari dan Kyai Abdul Wahab Abdullah yang kuat di kalangan pondok pesantren, menjadikan dengan mudah Nahdlatul Ulama mendapatkan dukungan dari para kyai pemimpin pondok pesantren. Hubungan yang dibangun antar kyai pondok pesantren di pulau jawa memudahkan penyebaran Nahdlatul ulama sampai ke beberapa daerah. Kyai yang memiliki santri, santri yang telah mendapatkan ilmu dari kyai tersebut, akan memohon restu dalam membangun pondok pesantren baru dengan membawa beberapa santri dari sang kyai.

⁴² Fathoni Ahmad, *Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama*, 31 Januari, 2020 dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0>

⁴³ M Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 52

⁴⁴ Jarman Arroisi dkk, *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Vol 04, Jurnal Islam Nusantara, 2020, No. 179

Pertumbuhan ini, menjadikan Nahdlatul Ulama turut tersebar hingga ke segala penjuru.

Kyai dan santri serta pondok pesantren menjadi penopang utama dalam perkembangan awal dari Nahdlatul Ulama. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, Nahdlatul Ulama berkembang dengan pesat terutama di pulau Jawa dan pulau Madura, kemudian disusul dengan wilayah di luar Jawa seperti Pulau Kalimantan di bagian selatan, pulau Sulawesi bagian selatan, dan beberapa daerah di pulau Sumatera.⁴⁵

Sebagai organisasi yang lahir sebelum masa kemerdekaan Indonesia di raih, Nahdlatul Ulama juga bergerak dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara. Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan ideologi, agama, dan negara merupakan bentuk dari cinta kepada tanah air atau yang sering warga nahdliyin sebutkan sebagai *hubbul wathon minal iman* yang artinya cinta tanah air atau nasionalisme merupakan bagian dari iman. Menurut K.H. Hasyim Asy'ari menjalankan jihad menjadi satu amalan yang besar dan penting dalam agama Islam. Jihad juga merupakan kewajiban bagi umat muslim dan wajib untuk melaksanakannya ketika diserang oleh kaum kafir. Dalam konteks penjajahan Belanda, K.H. Hasyim Asy'ari memberikan fatwa jihad untuk mempertahankan tanah air Indonesia menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia.⁴⁶

Proses transformasi Nahdlatul Ulama yang sejak awal diklaim sebagai tempat berkumpulnya kelompok-kelompok tradisional kemudian merambah menjadi organisasi yang lebih terbuka seiring lahirnya sarjana-sarjana Nahdlatul Ulama yang telah bersentuhan dengan wacana modernitas dan komunitas akademis di luar lingkungan Nahdlatul

⁴⁵ M Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 94

⁴⁶ Amin Farih, *Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Mempertahankan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Vol 24, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2016, Hal 259

Ulama.⁴⁷ Nahdlatul Ulama menjadikan sosok kyai sebagai tokoh utama dalam jalannya organisasi tersebut dan menjadikan pondok pesantren sebagai basis dari gerakan awal Nahdlatul Ulama. Pesantren sendiri pada zaman dahulu terletak di pedesaan atau kampung, dan memiliki banyak santri yang memiliki loyalitas tinggi kepada pendidiknya yaitu sang kyai.

Perkembangan zaman dan dengan lahirnya sarjana-sarjana dari Nahdlatul Ulama, menjadikan kyai-kyai Nahdlatul Ulama ikut mengalami perubahan dengan mulai terbuka terhadap nilai-nilai baru yang tentu selama nilai-nilai tersebut tidak jauh dari ajaran Islam dan paham *Ahlusunnah wal Jamaah*. Para kyai-kyai Nahdlatul Ulama tidak lagi selalu bersinggungan dengan persoalan agama, kemudian merambah kepada berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Para kyai Nahdlatul Ulama kemudian bersinggungan baik secara langsung ataupun tidak dengan politik, dan beberapa tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama yang aktif berpolitik seperti K.H. Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang menjadi Presiden RI ke-Empat, K.H.Kholil Bisri sebagai wakil ketua MPR, dan tokoh-tokoh kyai Nahdlatul Ulama yang aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.⁴⁸

Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam politik praktis secara signifikan dimulai pada tahun 1939.⁴⁹ Nahdlatul Ulama tergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI terbentuk pada tanggal 21 September 1937 dan disambut baik dan mendapatkan dukungan yang luas terutama di kalangan Islam mengingat MIAI menjadi forum yang menyuarakan kelompok Islam di Indonesia.⁵⁰ Namun kemudian pada tahun 1943 MIAI secara resmi dibubarkan dan kemudian berganti menjadi Masyumi, dan Nahdlatul Ulama masih tergabung di dalamnya. Nahdlatul

⁴⁷ Firdaus Muhammad, *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*, Vol 9, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2015, Hal 61

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Nurul Shobacha, *Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru*, Vol.2, Jurnal Review Politik, 2012, hal 106

⁵⁰ M Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 145

Ulama yang masih tergabung dalam Masyumi menjadi lebih masif dalam politik praktis.

Pada tahun 1952 hingga 1976 menjadi tahun dimana Nahdlatul Ulama tengah gencar-gencarnya dalam kancah politik nasional. Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang memiliki dua kekuatan sekaligus, karena selain menjadi organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama juga memiliki kekuatan sebagai partai politik. Pada masa tersebut, Nahdlatul Ulama merupakan partai politik terbesar di Indonesia. Tokoh yang mempelopori kesadaran politik bagi kalangan kyai NU sendiri adalah Wahid Hasyim.⁵¹ Posisi Nahdlatul Ulama yang kuat dalam pemerintahan, berbanding terbalik dengan posisi Nahdlatul Ulama di Masyumi yang semakin lemah. Hal ini dikarenakan Masyumi didominasi oleh Islam yang Reformis. Hingga akhirnya berdasarkan hasil Muktamar di Palembang pada bulan April tahun 1952, Nahdlatul Ulama mendirikan partai politik sendiri, dan keluar dari Masyumi.⁵² Saat itu, Nahdlatul Ulama berada pada masa kepemimpinan K.H. Idham Chalid sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁵³

Ketika Indonesia merdeka dari belunggu penjajahan, tidak berarti Nahdlatul Ulama kemudian diam tanpa ada pergerakan. Hal ini justru menjadikan para tokoh Nahdlatul Ulama semakin kuat, mengingat Indonesia yang baru saja merdeka perlu adanya usaha dalam membangun bangsa terutama mempertahankan negara yang baru saja lahir. Nahdlatul Ulama menjadi salah satu pelopor dalam penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai asas dalam bernegara dan bermasyarakat. Dengan ini,

⁵¹ Jarman Arroisi dkk, *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Vol 04, Jurnal Islam Nusantara, 2020, Hal 181.

⁵² Nurul Shobacha, *Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru*, Vol.2, Jurnal Review Politik, 2012, hal 107.

⁵³ Jarman Arroisi dkk, *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Vol 04, Jurnal Islam Nusantara, 2020, Hal 183.

Nahdlatul Ulama wajib untuk memelihara dan mempertahankan dasar negara tersebut.⁵⁴

Pada penyelenggaraan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-20 di Surabaya pada tahun 1954, pokok pembahasan yang diajukan dalam muktamar tersebut selain permasalahan diniyah, terdapat pembahasan strategi Nahdlatul Ulama dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 1955⁵⁵. Nahdlatul Ulama sebagai partai politik kemudian melakukan pendekatan kepada partai-partai nasional Indonesia yang memiliki basis kuat di wilayah Jawa dan memiliki tradisi atau nilai-nilai Jawa, serta berorientasi ke dalam dibandingkan berorientasi keluar seperti cita-cita demokrasi barat⁵⁶. Hal ini membuat kedekatan Nahdlatul Ulama dengan partai-partai nasional di Indonesia lebih dekat dengan kepemimpinan Soeharto, dibandingkan dengan Partai Masyumi yang lebih sering menjadi oposisi.

Pada pemilihan umum tahun 1955, partai Nahdlatul Ulama mampu merebut posisi urutan 3 (tiga) dari 28 partai politik yang ikut serta di dalamnya, sehingga mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, setelah berdirinya partai Nahdlatul Ulama, dalam pemerintahan yang berjalan, partai Nahdlatul Ulama tidak pernah absen keikutsertaannya. Pada masa krisis menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin hingga akhir dari dekade 1960-an, keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam politik dan pemerintahan, memiliki peran yang cukup besar dan tetap mampu bertahan⁵⁷. Hal ini terbukti ketika Masyumi pada tahun 1960 dibubarkan, yang menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai Islam terbesar di Indonesia bersama dengan Partai Syarikat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Berakhirnya masa Orde Lama karena peristiwa Gerakan 30 September, tidak menjadikan Nahdlatul Ulama yang

⁵⁴ Masmuni Mahatma, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara*, Vol 8, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 2017, hal 32

⁵⁵ Abubakar Madani, *Konsep Elite Politik Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 4

⁵⁶ Ibid, hlm. 5

⁵⁷ Ibid, hlm. 6

dekat pula dengan Soekarno ikut berakhir. Namun dengan adanya pemerintahan baru, partai-partai Islam memiliki semangat baru.

Lahirnya pemerintahan yang baru tentu memiliki harapan yang jauh lebih baik lagi bagi Nahdlatul Ulama, justru tidak sesuai harapan. Pada awal orde baru, Nahdlatul Ulama masih memiliki posisi yang kuat di dalam pemerintahan, namun kemudian mengalami penurunan kekuatan di dalam pemerintah, seperti tidak mendapatkan jabatan eksekutif bahkan untuk jabatan Menteri Agama yang kerap kali diisi oleh Nahdlatul Ulama kemudian tergantikan pada masa orde baru. Nahdlatul Ulama dianggap dapat menghambat dan mengancam gagasan politik pembangunan bagi para elite di orde baru⁵⁸. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Nahdlatul Ulama terkena dampak dari program restrukturisasi partai politik. Kebijakan tersebut menjadikan kekuatan politik formal Islam melemah.⁵⁹ Nahdlatul Ulama bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973 atas perintah Presiden Soeharto sebagai wujud dari penerapan kebijakan restrukturisasi partai politik di zaman orde baru. Selama tergabung dalam PPP, Nahdlatul Ulama turut dalam Pemilihan Umum tahun 1977 dan tahun 1982.⁶⁰

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1984 di Situbondo menjadi sebuah catatan monumental karena Nahdlatul Ulama menyatakan untuk kembali pada khittahnya tahun 1926. Nahdlatul Ulama kembali menjadi organisasi masyarakat yang berbasis pada keagamaan terutama Islam. Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi wadah politik, sehingga para elite Nahdlatul Ulama seperti kyai tidak lagi terperungku dalam partai NU lagi, namun dapat berafiliasi dengan partai politik manapun dan sejak saat itu para kyai dapat dekat kembali dengan pemerintah tanpa perlu merasa dicurigai, justru sering untuk difasilitasi dalam menjalankan aktifitas dan

⁵⁸ Ibid, hlm. 12

⁵⁹ Firdaus Muhammad, *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*, Vol 9, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2015, hal 71

⁶⁰ Masmuni Mahatma, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara*, Vol 8, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 2017, hal 44

kegiatannya.⁶¹ Kyai Wahab Hasbullah selaku Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada waktu Mukhtamar ke 25 di Surabaya pada tahun 1971, memberikan himbauan kepada para aktivis Nahdlatul Ulama untuk kembali kepada khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Menurut Feillard yang dikutip oleh Nurul Shobacha, terdapat beberapa faktor terkait penolakan keikutsertaan pada pusran politik. Yang pertama adalah tekanan yang diderita oleh para pegawai negeri atau para pengusaha yang tergantung pada administrasi untuk mendapatkan bagian tender dalam pekerjaan umum. Dan faktor yang kedua yang tak kalah penting ialah karena Nahdlatul Ulama melakukan pengabaian terhadap tugas utamanya yakni dalam bidang sosial dan kependidikan. Nahdlatul Ulama terlalu fokus pada urusan politik. Hal ini didukung pula ketika Idham Chalid yang sering merahasiakan hal yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu, Idham Chalid tidak memberikan dukungan kepada wilayah cabang yang tengah mengalami tekanan dari pemerintahan. Dalam beberapa kasus daerah cabang tersebut menjadi hancur.⁶²

Masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, dimana negara tengah membangun kembali, pasca jatuhnya orde baru. Walaupun tidak lagi menjadi sebuah partai politik, Nahdlatul Ulama tetap memiliki peran dalam upaya membangun bangsa. Setelah kembali pada khittah 1926 Nahdlatul Ulama dan pasca kepemimpinan Gusdur, para ulama atau kyai Nahdlatul Ulama berusaha untuk menunjukkan identitasnya sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Sebelumnya pada masa awal reformasi, bermunculan partai-partai yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki alasan sebagai integralitas wadah penyaluran aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Dengan hal tersebut, PKB

⁶¹ Abubakar Madani, *Konsep Elite Politik Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 13

⁶² Nurul Shobacha, *Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru, Vol.2*, Jurnal Review Politik, 2012, hal 110

diklaim sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga Nahdlatul Ulama⁶³.

Pada gelaran Pemilihan Umum tahun 1999 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 51 kursi di DPR dan menghantarkan Gusdur menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Pada pemilihan umum tahun 2004, partai yang dideklarasikan oleh Gusdur mampu memperoleh 52 kursi legislatif.⁶⁴ Hal ini menandakan bahwa, meskipun Nahdlatul Ulama telah kembali pada khittah 1926, tidak dapat terhindari bahwa tokoh ataupun elite Nahdlatul Ulama tetap bermain pada pusaran politik praktis. Hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB tidak bersifat struktural, tidak ada sangkut pautnya secara garis organisasi dengan Nahdlatul Ulama. Hubungan keduanya hanya bersifat moral, kultural, historis, dan aspiratif⁶⁵. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga berusaha mengambil garis demarkasi antara Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dan dinamika yang ada di dalam Nahdlatul Ulama.⁶⁶

Keputusan untuk kembali pada khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926, menjadi sebuah pembatas bagi masyarakat dan elite Nahdlatul Ulama untuk tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik praktis, sehingga dapat lebih fokus pada mengelola menumbuhkan peradaban pendidikan.⁶⁷ Nahdlatul Ulama berupaya untuk terus membangun bangsa tanpa harus ikut dalam politik praktis. Walaupun demikian, tokoh maupun masyarakat Nahdlatul Ulama dapat terlibat dalam politik praktis. Setelah memutuskan untuk kembali pada khittah 1926, Nahdlatul Ulama kemudian menyusun

⁶³ Abubakar Madani, *Konsep Elite Politik Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 14.

⁶⁴ Nurul Shobacha, *Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru, Vol.2*, Jurnal Review Politik, 2012, hal 110

⁶⁵ Abubakar Madani, *Konsep Elite Politik Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 15.

⁶⁶ Firdaus Muhammad, *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*, Vol 9, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2015, hal 68

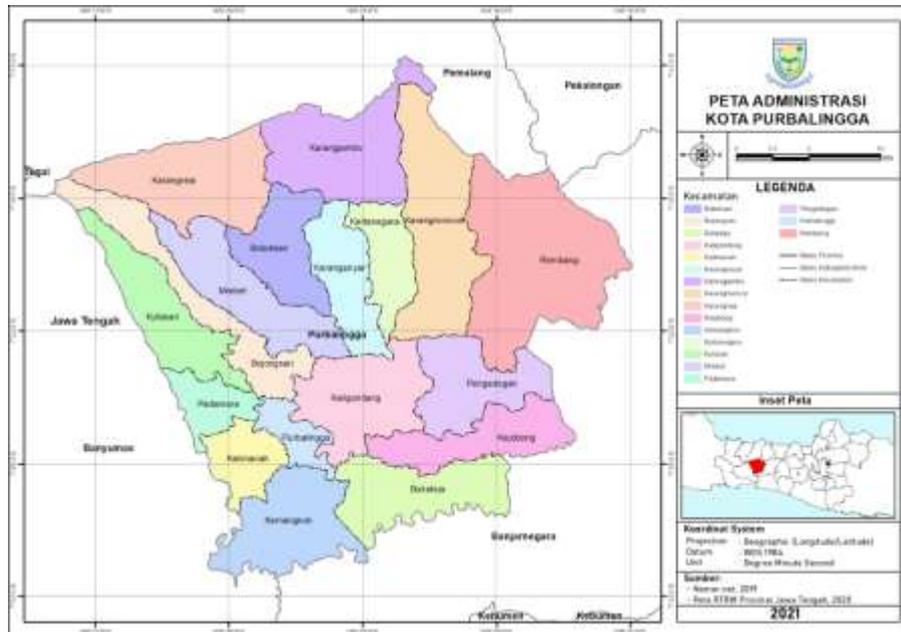
⁶⁷ Masmuni Mahatma, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara*, Vol 8, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 2017, hal 39

pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama walaupun tidak lagi terjun langsung kepada politik praktis, bukan berarti tidak memperbolehkan warga NU untuk turut dalam berpolitik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga menjadi bagian dari wilayah administratif provinsi Jawa Tengah. Dengan memiliki luas wilayah 77.764,122 ha, Kabupaten Purbalingga menempati 2,39 persen wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Purbalingga yang terletak pada posisi 101°11' – 109°35' Bujur Timur, dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan, diapit oleh beberapa rangkaian pegunungan. Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 (delapan belas) wilayah kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan dan 224 (dua ratus dua puluh empat) desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tahun 2020). Wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara dibagian Timur, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara di bagian Selatan, dan Kabupaten Banyumas di bagian Barat. Berikut peta wilayah Kabupaten Purbalingga :

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga



Sumber : <https://sigbudpbg.informatika.ump.ac.id/profil.php>

Dengan luas wilayah tersebut, penduduk di kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mencapai . Rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per-kecamatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Kemangkon	31.915	31.707	63.622
Bukateja	39.257	38.857	78.114
Kejobong	25.465	25.273	50.738
Pengadegan	20.541	20.505	41.046
Kaligondang	32.928	32.620	65.548
Purbalingga	28.587	28.993	57.580
Kalimanah	29.028	28.639	57.667
Padamara	23.402	23.131	46.533

Kutasari	33.233	32.002	65.235
Bojongsari	32.146	30.949	63.095
Mrebet	39.559	38.310	77.869
Bobotsari	26.925	26.394	53.319
Karangreja	23.730	22.910	46.640
Karangjambu	14.496	13.582	28.078
Karanganyar	20.533	19.538	40.091
Kertanegara	18.831	18.095	36.926
Karangmoncol	30.029	28.514	58.543
Rembang	34.656	33.261	67.917
Total	505.281	493.280	998.561

Sumber : Purbalingga dalam Angka 2021

Mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Purbalingga, hampir seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam. Selebihnya memegang agama Kristen Protestan dan Katolik, serta agama lain. Berikut rincian penduduk Kabupaten Purbalingga berdasarkan agama yang di anut pada tahun 2020 :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020.

Kecamatan	Islam	Prote stan	Katol ik	Hindu	Budha	Kong hucu	Lainnya
Kemangkon	63.755	233	543	-	-	-	1
Bukateja	73.851	275	146	-	-	-	8
Kejobong	51.949	22	-	-	-	-	-
Pengadegan	86.744	-	76	-	-	-	-
Kaligondang	67.534	283	55	-	-	-	-
Purbalingga	53.647	2.101	1091	-	-	-	75
Kalimanah	56.212	426	97	-	-	-	13
Padamara	46.517	96	160	-	-	-	11

Kutasari	65.207	144	13	-	-	-	-
Bojongsari	64.468	55	32	-	-	-	31
Mrebet	129.675	199	45	-	-	-	31
Bobotsari	55.392	213	146	-	-	-	1
Karangreja	41.700	153	-	-	-	-	-
Karangjambu	31.001	-	-	-	-	-	-
Karanganyar	41.298	5	5	-	-	-	-
Kertanegara	38.693	1	1	-	-	-	-
Karangmoncol	65.111	4	27	-	-	-	1
Rembang	66.528	13	32	-	-	-	18
Total	1.099.282	4.223	2.469	-	-	-	190

Sumber : Purbalingga dalam Angka 2021

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Purbalingga yang memeluk agama Islam, dibarengi dengan pembangunan keagamaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya melalui pembangunan pendidikan yang berdasarkan pada agama, seperti pada pendidikan formal ada Madrasah Negeri dari tingkat dasar hingga menengah atas dibawah Kementerian Agama. Dan ada juga pendidikan nonformal Islam seperti, Taman Pendidikan al-Quran, Majelis Ta'lim, dan Pondok Pesantren.

Tercatat dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, provinsi Jawa Tengah, terdapat 3.927 pondok pesantren pada tahun 2020/2021. Di Kabupaten Purbalingga sendiri terdapat 75 (tujuh puluh lima) pondok pesantren yang terdata oleh Kementerian Agama. Sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di kabupaten Purbalingga keberadaannya membantu mewujudkan sapta cita Kabupaten Purbalingga yang dicanangkan oleh Bupati Purbalingga yakni membentuk warga masyarakat Purbalingga yang religius, menjadi benteng dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Berikut merupakan daftar Pondok Pesantren di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020/2021 :

Tabel 2.3. Daftar Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Purbalingga

Nama Pondok Pesantren	Alamat
Pondok Pesantren al-Husaini	Kemangkon
Pondok Pesantren Nurul Fadilah	Kemangkon
Pondok Pesantren Roudlotul Thullab	Kemangkon
Pondok Pesantren Barokatul Quran	Kemangkon
Pondok Pesantren Syekh Yusuf Taj'alkhalwaty	Kemangkon
Pondok Pesantren al-Islah	Bukateja
Pondok Pesantren Darul Abror	Bukateja
Pondok Pesantren Darusslam	Bukateja
Pondok Pesantren Fathul Ulum	Bukateja
Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan	Bukateja
Pondok Pesantren Minhajut Tholabah	Bukateja
Pondok Pesantren Nahdlout Thollab	Bukateja
Pondok Pesantren Nuurul Qur'an	Bukateja
Pondok Pesantren Raudlatul Asmuyyah	Bukateja
Pondok Pesantren Yusufiyah	Bukateja
Pondok Pesantren Attohariyyah	Kejobong
Pondok Pesantren Miftakhussurur	Kaligondang
Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan	Purbalingga
Pondok Pesantren Irsyadutthulab	Kertanegara
Pondok Pesantren Abu Dardiri	Purbalingga
Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an	Purbalingga
Pondok Pesantren Ummul Quro	Purbalingga
Pondok Pesantren Minhajussolihin	Purbalingga
Pondok Pesantren el-Sucharry	Purbalingga
Pondok Pesantren ar-Rahman	Kalimanah
Pondok Pesantren Roudlotul Arifin	Kalimanah
Pondok Pesantren al-Bahjah	Kalimanah

Pondok Pesantren Dar Al Fateh	Kalimarah
Pondok Pesantren Tunas Ilmu	Kalimarah
Pondok Pesantren An-Nahl	Kutasari
Pondok Pesantren Nurul Huda	Kutasari
Pondok Pesantren al-Hidayah	Kutasari
Pondok PesantrenMujahadah	Mrebet
Pondok Pesantren al-Furqon	Bobotsari
Pondok Pesantren Durrotut Tolibin	Bobotsari
Pondok Pesantren al-Ikhlash	Bobotsari
Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Karangreja
Pondok Pesantren al-Hidayah	Karanganyar
Pondok Pesantren al-Itqon	Karanganyar
Pondok Pesantren al-Mushafiiyyah	Karanganyar
Pondok Pesantren Darul Abror	Karanganyar
Pondok Pesantren Darul Ikhya	Karanganyar
Pondok Pesantren Nurul Huda	Karanganyar
Pondok Pesantren Roudlotussolihin	Karanganyar
Pondok Pesantren Darul Ulum	Karangmoncol
Pondok Pesantren Darusslam	Karangmoncol
Pondok Pesantren Mahdum Wali Perkasa	Karangmoncol
Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum	Karangmoncol
Pondok Pesantren Nuruul Huda	Karangmoncol
Pondok Pesantren Madinah al-Ikhlash	Rembang
Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Rembang
Pondok Pesantren al-Amanah Assaliah	Karangjambu
Pondok Pesantren al Ikhsan	Karangjambu
Pondok Pesantren al Intihadiyyah	Karangjambu
Pondok Pesantren al Ridlo	Karangjambu
Pondok Pesantren Assalf	Karangjambu
Pondok Pesantren Darussalam	Karangjambu

Pondok Pesantren Istiqomatussalafiyah	Kertanegara
Pondok Pesantren Salafiyah	Kertanegara
Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum	Kertanegara
Pondok Pesantren Mamba'ul Ikhsan	Kertanegara
Pondok Pesantren al-Ikhtihad	Padamara
Pondok Pesantren Nurul Adzkar	Padamara
Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud	Padamara
Pondok Pesantren Sunan Gringsing	Padamara
Pondok Pesantren Nurul Barokah	Bojongsari
Pondok Pesantren Roudlotul Mu'jizat	Bojongsari
Pondok Pesantren al-Mansurroh	Bojongsari
Pondok Pesantren Nurul Ulum	Pengadegan
Pondok Pesantren Nuurul Huda	Pengadegan

Sumber : Data Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2022

Berdasarkan data tersebut, dalam setiap wilayah kecamatan di kabupaten Purbalingga setidaknya terdapat 1-2 Pondok Pesantren berdiri untuk mengajarkan ajaran Islam. Adanya pondok pesantren ini pula turut membangun karakter Sumber Daya Manusia di kabupaten Purbalingga yang lebih religius dan berakhlakul karimah.

C. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga

Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni Isfandiari Mahbub Djunaidi yang pada saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Roudlotus Sholichin Sukawarah, Kalijaran, Karanganyar, Kabupaten Purbalingga pada acara rangkaian Satu Abad Hari Lahir Nahdlatul Ulama menuturkan, almarhum K.H. Hisyam Abdul Karim atau dulu biasa disapa mbah Hisyam merupakan tokoh yang sangat berperan di awal pergerakan Nahdlatul Ulama. Beliau juga yang membawa ajaran Nahdlatul Ulama ke wilayah Kabupaten Purbalinggan dan menyebarkanluaskannya dengan mendirikan Pondok Pesantren pada tahun

1929⁶⁸. Selain mengajarkan ajaran aswaja an-nahdliyah, lewat pondok pesantren ini pula Mbah Hisyam turut membela kemerdekaan Indonesia, dengan menjadikan pondok pesantrennya sebagai tempat pelatihan bagi pemuda untuk turut membela negara.

Menurut K.H. Saifudin Zuhri, lapangan di pondok pesantren milik Mbah Hisyam selalu dipenuhi oleh pemuda-pemuda, dapat dikatakan sebagai pemuda Ansor. Disana para pemuda Ansor berlatih baris-berbaris, belajar huruf morse, dan belajar memberi pertolongan pertama dalam kecelakaan⁶⁹. Mbah Hisyam sendiri dekat dengan pendiri Nahdlatul Ulama yakni K.H. Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Mbah Hisyam pernah diberikan Kitab al-Muwattha oleh mbah Hasyim untuk terus meneruskan syiar kepada nahdliyin⁷⁰. Prof. K.H. Syaifudin Zuhri menerangkan tokoh Nahdlatul Ulama lainnya yang ada di Purbalingga pada masa yang sama dengan Mbah Hisyam ialah Kyai Raden Iskandar dari daerah Karangmoncol, daerah timur Purbalingga. Adapula tokoh Hudimiharja sebagai ketua dari Ansor di wilayah Kertanegara, Purbalingga⁷¹.

Nahdlatul Ulama pada masa sebelum Kemerdekaan Indonesia, terutama di daerah kabupaten Purbalingga, menjadi basis bagi para pemuda yaitu pada gerakan pemuda ansor, berupaya untuk turut membela dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Para tokoh Nahdlatul Ulama di wilayah kabupaten Purbalingga dengan wilayah Banyumas kerap kali mengadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai arah gerak pada masa meraih kemerdekaan. Prof. Saifudin Zuhri yang berasal dari Banyumas mengungkapkan perjalannya ke daerah

⁶⁸(2023, 06 Februari), "Harlah Seabad NU di Purbalingga, Jajaran PBNU Silaturahmi ke Ponpes Roudlotus Sholochin", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/nusantara/556072/harlah-seabad-nu-di-purbalingga-jajaran-pbnu-silaturahmi-ke-ponpes-roudlotus-sholichiin>

⁶⁹ Saifudin Zuhri, "Guruku Orang-Orang dari Pesantren", (Yogyakarta: Pustaka Sastra LkiS, 2007), Hlm.88

⁷⁰(2023, 06 Februari), "Harlah Seabad NU di Purbalingga, Jajaran PBNU Silaturahmi ke Ponpes Roudlotus Sholochin", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/nusantara/556072/harlah-seabad-nu-di-purbalingga-jajaran-pbnu-silaturahmi-ke-ponpes-roudlotus-sholichiin>

⁷¹ Saifudin Zuhri, "Guruku Orang-Orang dari Pesantren", (Yogyakarta: Pustaka Sastra LkiS, 2007), Hlm.83

Purbalingga, membahas mengenai sikap yang akan diambil terkait mobilisasi para pemuda-pemuda terutama pemuda islam oleh pemerintah Belanda⁷².

Perjalanan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga hingga memasuki abad ke-20, masih aktif dan menjadi organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki banyak pengikutnya. Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Tidak jarang pula tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti ulama tau kyai, ataupun ustadz memiliki tempat pendidikan al-Quran dan kitab-kitab. Para tokoh kyai atau pemuka agama tersebut tergabung dalam Nahdlatul Ulama dan sering menjadi bagian dari dewan syuriah Nahdlatul Ulama.

Program-program keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga sering kali juga melibatkan pemerintah kabupaten Purbalingga. Sinergi yang tercipta dari Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah kabupaten Purbalingga tentu ditujukan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat khususnya di wilayah Purbalingga. Salah satu program Nahdlatul Ulama yang berjalan di kabupaten Purbalingga dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Purbalingga ialah keberjalanan gerakan Koin NU dengan lembaga UPZIZ dan Laziznu Purbalingga. Bupati Purbalingga menyampaikan bahwa program Koin NU membantu dalam pembangunan keagamaan maupun sosial yang ada di kabupaten Purbalingga. Harapannya program ini terus memberikan manfaat bagi warga Nahdliyin dan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Bupati Purbalingga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama kabupaten Purbalingga karena telah memebrikan dharma bakti yang nyata kepada pembangunan di Kabupaten Purbalingga⁷³.

⁷² Ibid.

⁷³ Humas, Setda, (2023, 05 Februari) "Peringati Satu Abad NU, Bupati Tiwi Canangkan Program Koin NU" Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga,

Nahdlatul Ulama dengan tokoh-tokohnya yang ada di kabupaten Purbalingga telah aktif dalam berupaya membangun daerahnya dari masa ke masa. Perkembangan zaman yang telah dilalui, tidak menjadikan Nahdlatul Ulama tetap pada ke-tradisionalitasnya namun juga menerima modernitas sebagai upaya membangun organisasi untuk kemsalahatan umat bersama.

D. Pemilihan Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Pemilihan Bupati termasuk dalam pemilihan yang mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati menggunakan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil, yang kemudian diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional. Yang mana pada proses pemilihan Bupati, terdapat beberapa proses tahapan yang harus dilakukan oleh bakal calon Bupati ditetapkan sebagai Calon Bupati.

Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kontestasi politik pada tahun 2020, yakni penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga. Penyelenggaraan Pemilihan ini serentak di Indonesia, pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Namun yang membedakan dengan pemilihan tahun sebelumnya, penyelenggaraan kontestasi pemilihan pemimpin daerah kali ini diselenggarakan di tengah wabah *Corona Virus Disease* atau COVID-19. Penanganan dan pencegahan akan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, mengikuti aturan *World Health Organization* atau WHO, yang mana salah satunya adalah membatasi ruang gerak manusia, melakukan *physycal distancing* atau jaga jarak sekurangnya 2 (dua) meter antar Individu. Bahkan

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan berupa untuk tetap di dalam Rumah, melakukan pekerjaan secara *work from home*. Hal ini berdampak juga pada jalannya demokrasi di Indonesia, salah satunya penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020.

Sejatinya, penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Namun dengan mewabahnya dan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan serentak dijadwalkan ulang yang awalnya tanggal 27 September 2020, menjadi tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sendiri merupakan Pilkada serentak yang termasuk pada gelombang ke-4 (empat), setelah 5 tahun lalu pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Sejumlah 270 daerah di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, dengan rincian 9 (sembilan) provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota⁷⁴.

Salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak gelombang ke-empat ialah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga yang menjadi bagian wilayah administratif dari Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, setelah 5 (lima) tahun sebelumnya pada tahun 2015 telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun tersebut. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Purbalingga berjalan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, terutama Komisi Pemilihan Umum kabupaten Purbalingga.

⁷⁴ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia". Vol 2(2), Crepido, 2020, hlm. 87-88.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, mempertemukan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang pertama adalah Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim. Sementara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang kedua adalah Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono. Tentunya kedua pasangan calon tersebut, didukung oleh partai politik yang membentuk koalisi. Berikut merupakan peta koalisi partai pada pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020.

Tabel 2.4 Koalisi Partai Politik Pemilihan Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Pasangan Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim	Pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono
<ol style="list-style-type: none"> 1. PPP 2. PKB 3. Partai Nasdem 4. Partai Demokrat 5. Partai Gerindra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDIP 2. Partai Golkar 3. PKS 4. PAN

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Gambar 2.2 Penyerahan Berkas Bapaslon Tiwi-
Dono pada KPU Purbalingga



Sumber : instagram/kpupbg

Gambar 2.3 Penyerahan Berkas Bapaslon Oji
Jeni pada KPU Purbalingga



Sumber : instagram.kpupbg

Partai Politik yang tidak termasuk dalam parlemen, seperti Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, memberikan dukungan kepada pasangan calon Tiwi-Dono pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020. Selain dukungan dari partai politik, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mendapatkan dukungan pula dari beberapa tim relawan pemenang.

Pasangan calon Muhamad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim menjadi pasangan nomor urut 1 (satu). Sehingga pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono menjadi pasangan nomor urut 2 (dua). Kedua kubu bersaing untuk memperoleh suara masyarakat. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020,

yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, jumlah pemilih mencapai 743.546 jiwa pemilih. Rincian Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebagai berikut :

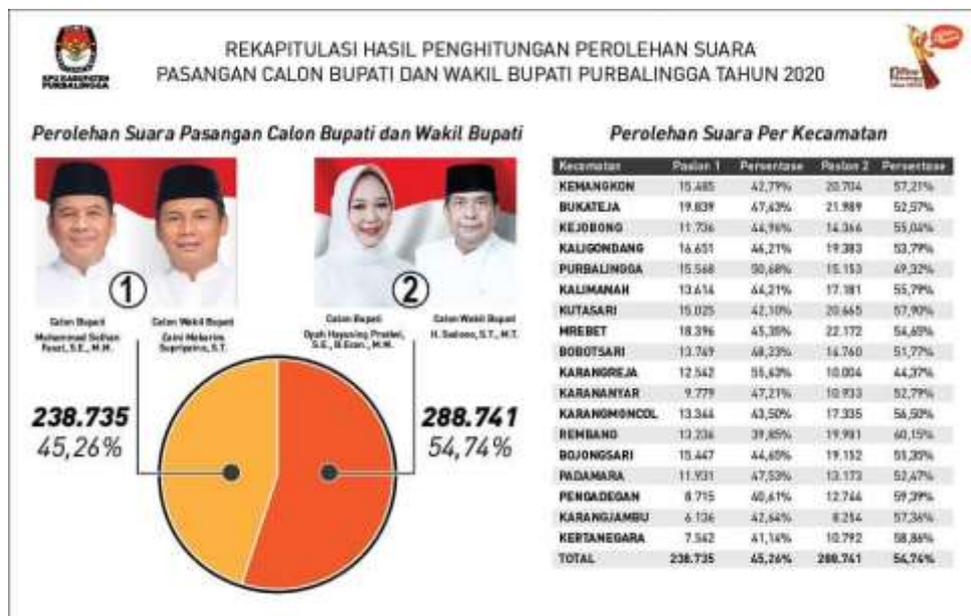
Tabel 2.5 Mapping TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	Total L + P
Kemangkon	137	24.070	24.215	48.285
Bukateja	165	29.287	29.078	58.365
Kejobong	106	19.181	19.269	38.450
Pengadegan	142	24.938	24.872	49.810
Kaligondang	136	20.634	21.812	42.446
Purbalingga	115	20.682	20.949	41.631
Kalimanah	140	23.983	23.351	47.334
Padamara	163	28.925	28.703	57.628
Kutasari	109	20.192	20.158	40.350
Bojongsari	90	17.280	16.665	33.945
Mrebet	90	15.872	15.093	30.965
Bobotsari	124	22.474	21.634	44.108
Karangreja	147	26.186	25.175	51.361
Karangjambu	138	23.323	22.820	46.143
Karanganyar	97	16.315	16.476	32.791
Kertanegara	92	15.493	15.666	31.159
Karangmoncol	63	10.753	10.044	20.797
Rembang	75	14.222	13.756	27.978
Total	2.129	373.810	369.736	743.546

Sumber : Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, diperoleh hasil bahwa Pasangan Tiwi-Dono memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Oji-Jeni. Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020, dijelaskan lebih lengkap pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020



Sumber : Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2020.